



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme I*. Jakarta : Penerbit Bina Cipta.
- Chazawi, Adamzi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Danil, Elwi. 2011. *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana dan Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi, 2006. *Tindak Pidana Korupsi cetakan kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hatta, Moh. 2014. *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- Hierarij, Eddy O.S.. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Cahya Atma Pustaka.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (1)*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahrus, Ali. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marbun. S.F. dan Moh. Mahfud M.D.. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marwan & Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum Cetakan I*. Surabaya: Reality Publisher.



- Minarno, Nur Basuki. 2010. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Muhammad, Abdulkadir. 1981. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta Universitas Indonesia Press.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro cetakan kedua.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju.
- Nurdjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi-Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo : Zifatama Publishing.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Piidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- S. Tanosubroto, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Surachman, EQ. RM., Jan S. Marinka. 2015. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bissnis*. Jakarta: , PT Raja Grafindo Persada.

B. INTERNET

- “FAQ PIP”, <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/informasi-publik/faq-permohonan-informasi> diakses pada 12 April 2018,



“Pengertian Kejaksaan”, https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada 10 Januari 2018

“Signature and Ratification Status”, <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html>, diakses pada 14 Desember 2017

C. JURNAL DAN HASIL PENELITIAN

Artidjo Alkotsar. 2013. *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*.

Deddy. 2009. *Kewenangan Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana*. Tesis, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia.

Derliana Sari. 2008. *Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fuad Akbar Yamin. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian dalam Perakara Tindak Pidana Korupsi*. Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin.

Raymundus Lejau. 2009. *Eksekusi Putusan Pengadilan tentang Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-347/A/JA/12/12/2005; Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/12/2005 tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915).

Nota Dinas Nomor : ND-53/24.Ek/06/2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.



Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041).

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-12/A/Cu.2/01/2013 perihal Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-116/A/JA/07/2015 Perihal Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-1535/F/Fu.1/05/2014 Perihal Administrasi Pencarian dan Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana untuk Menutupi Uang Pengganti.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).